

PERANAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD) DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2011-2015

SKRIPSI



Dosen Pembimbing :

Sahabudin Sidiq, Dr., S.E., M.A.

Disusun Oleh:

Nama : Nia Safitri
Nomor Mahasiswa : 14313368
Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

**PERANAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2011-2015**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi



Nama : Nia Safitri

Nomor Mahasiswa : 14313368

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa sripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.



NIA SAFITRI

PENGESAHAN SKRIPSI

“Peranan Sektor Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Provinsi Banten Tahun 2011-2015”

Nama : Nia Safitri

Nomor Mahasiswa : 14313368

Program Studi : Ilmu Ekonomi



Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Sahabudin Sidiq, Dr., S.E., M.A.

..

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PERANAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
PROVINSI BANTEN TAHUN 2011-2015**

Disusun Oleh : NIA SAFITRI

Nomor Mahasiswa : 14313368

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 12 April 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.



Penguji : Akhsyim Afandi, Drs., MA., Ph.D.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“THE ONE WHO FALLS AND GETS UP IS SO MUCH STRONGER THAN
THE ONE WHO NEVER FELL”

“Man Jadda Wajada, Man Shobara Zhafiro, Man Saaro Ala Darbi Washola”

“Jangan berubah untuk orang lain, namun berubahlah untuk menjadi
orang yang lebih baik lagi”

“Sesuatu akan menjadi kebanggan jika sesuatu itu dikerjakan, dan
bukan hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan
jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya, bukan hanya akan
menjadi impian.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis mampu menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi berikut.
2. Ibu, Bapak, Kakak, dan Adik yang selalu menjadi semangat dalam kehidupan penulis, yang selalu memberikan semangat serta do'a nya kepada penulis agar selalu sukses dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Bapak Sahabudin Sidiq yang telah membimbing penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Teman-teman penulis yang berjuang bersama dalam suka dan duka.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul "*Peranan Sektor Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten tahun 2011-2015*" dengan baik.

Dalam proses awal penulisan skripsi hingga selesai telah banyak pihak yang memberikan bimbingan, bantuan, masukan, nasihat serta dukungan semangat kepada penulis. Penulis menyadari bahwa segala hal yang penulis peroleh adalah hal yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis setulus hati mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat sehat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Ibu Sarmi dan Bapak Sya'bani yang selalu memberikan dukungan moral hingga materil, perhatian, serta kasih sayang yang tidak terhingga dan do'a yang tiada henti agar penulis selalu berada dalam lindungan Allah SWT serta agar menjadi anak yang dapat menjadi kebanggan keluarga.

3. Kakak dan adik tercinta penulis, mbak Nurul Azizah dan Salma Umi Hanifah. Terimakasih karena kalian telah memberikan arti persaudaraan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Dwiprpto Agus Hardjito, M.S.i selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Sahabudin Sidiq, Dr., S.E, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
6. Dosen-dosen Ilmu Ekonomi FE UII yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga dalam masa perkuliahan penulis.
7. Bapak Dwi Anjar Suseno selaku Staf Prodi Ilmu Ekonomi yang telah membantu urusan akademik Penulis.
8. Teman-teman terkasih dan tersayang penulis, Lulita Sari, Wulandari Putri, Nindy Gusti, Melissa Arum, dan Fitria Ayu. Terimakasih karena telah mewarnai dan menemani serta berbagi suka dan duka dengan penulis dalam kehidupan selama di dunia perkuliahan dan seterusnya.
9. Teman-teman kos Safitri: Cintia Zelin, Ade Nur Selviani, Septianti Anita Devi, Rosy Amalia Rosyada, Rahmawati Nur Waridah, Shania Rizky Amalia, dan Mia Hernawati. Terimakasih telah menemani dunia non-perkuliahan penulis.

10. Kelompok belajar Kompre, Bismillah Squad. Satu bulan belajar bersama untuk menghadapi ujian Kompre membuat penulis memiliki teman baru yang berarti.
11. Teman-teman KKNKL-394, Ulul, Arifah, Hesty, Afuah, Akbar, Isya, dan Rickoh. Yang telah menemani penulis hidup bersama selama satu bulan masa KKN.
12. Teman saya Asprilla Dedy yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, nasihat, dan do'a kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Maret 2018

Penulis

NIA SAFITRI

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA TUGAS UJIAN AKHIR/SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAKSI.....	xvi
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB IKAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah	13
2.2.2 Belanja Daerah	14
2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	20
2.2.4 Pajak Daerah	25

2.2.5	Industri	26
2.3	Hubungan Antar Variabel Dependen dengan Variabel Independen	28
2.3.1	Hubungan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	28
2.3.2	Hubungan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah	29
2.3.3	Hubungan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	29
2.3.4	Hubungan Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah	30
2.4	Hipotesis Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Jenis Data dan Pengumpulan Data	31
3.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian	31
3.2.1	Variabel Dependen (Y)	32
3.2.2	Variabel Independen (X)	32
3.3	Metode Analisis	34
3.3.1	Model Common Effect	34
3.3.2	Model Fixed Effect	35
3.3.3	Model Random Effect	36
3.3.4	Analisis Data	37
3.4	Objek Penelitian	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Deskripsi Data penelitian	41
4.2	Deskripsi Objek Data Penelitian	41
4.2.1	Pendapatan Asli Daerah	41
4.2.2	Belanja Daerah	43
4.2.3	Produk Domestik Regional Bruto sektor Industri	44
4.2.4	Pajak Daerah	45

4.2.5	Industri	46
4.3	Persamaan Regresi	47
4.4	Hasil Estimasi Regresi.....	48
4.4.1	Pemilihan Model	48
4.4.2	Likelihood Ratio Test (Chow Test)	48
4.4.3	Hausman Test.....	49
4.5	Model Regresi Terbaik	50
4.5.1	Model Random Effect	50
4.6	Pengujian Hipotesis	52
4.6.1	Uji T (Pengujian Variabel Secara Individu).....	52
4.6.2	Uji Signifikansi Bersama (Uji F)	53
4.6.3	Koefisien Determinasi R^2	53
4.7	Interpretasi Hasil Analisis	54
4.7.1	Analisis Pendapatan Asli Daerah	54
4.7.2	Analisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten	57
4.7.3	Analisis Pengaruh PDRB Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten	58
4.7.4	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten	59
4.7.5	Analisis Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten	59
BAB VKESIMPULAN DAN IMPLIKASI		61
5.1	Kesimpulan.....	61
5.2	Implikasi.....	62
DAFTAR PUSTAKA		64

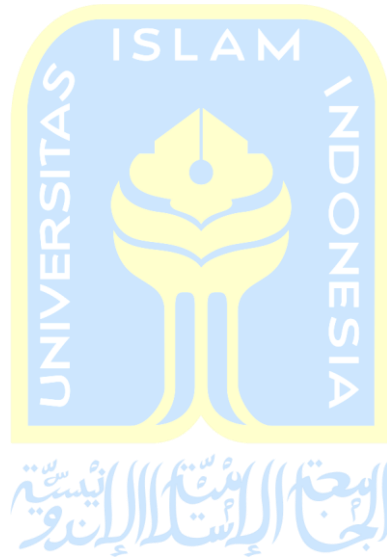
LAMPIRAN	66
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 PDRB sektor Industri dan PAD di Provinsi Banten Periode 2011-2015 (dalam juta rupiah).....	6
Tabel 4. 1 PAD per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	42
Tabel 4. 2 Belanja Daerah per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2011- 2015 (Juta Rupiah)	44
Tabel 4. 3 PDRB Industri per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2011- 2015 (Juta Rupiah)	45
Tabel 4. 4 Pajak Daerah per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	46
Tabel 4. 5 Jumlah Industri per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2011- 2015 (Unit)	47
Tabel 4. 6 Hasil dari Likelihood Ratio Test (Chow Test).....	49
Tabel 4. 7 Hasil dari Hausman Test	50
Tabel 4. 8 Hasil Regresi Model Random Effect	51
Tabel 4. 9 Ringkasan Estimasi Hasil Output Regresi Data Panel.....	51
Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Hipotesis	52
Tabel 4. 11 Koefisien antar Kabupaten/Kota.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 DATA PENELITIAN	66
Lampiran 2 HASIL REGRESI COMMON EFFECT MODEL.....	68
Lampiran 3 HASIL REGRESI RANDOM EFFECT MODEL	69
Lampiran 4 HASIL REGRESI FIXED EFFECT MODEL	70
Lampiran 5 HASIL REGRESI UJI CHOW	71
Lampiran 6 HASIL REGRESI UJI HAUSMAN	72



ABSTRAKSI

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dari kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Industri pada periode tahun 2011-2015 di Provinsi Banten. Faktor-faktor yang dianalisis adalah Belanja Daerah, PDRB Industri, Pajak Daerah, dan Jumlah Industri dengan periode tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan runtut waktu *time series* dari tahun 2011 sampai 2015, dan *cross section* sebanyak 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil regresi terbaik pada penelitian ini adalah dengan metode regresi *Fixed Effect Model*, namun penulis menganalisis *Random Effect Model* karena hasil yang paling sesuai dengan keadaan yang diketahui variabel Belanja Daerah, dan Jumlah Industri signifikan secara positif, sedangkan variabel PDRB Industri diketahui signifikan secara negatif, dan Pajak Daerah diketahui tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Industri di Provinsi Banten.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, PAD, Belanja Daerah, PDRB Industri, Pajak Daerah, dan Jumlah Industri.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dari kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin mandiri daerah tersebut dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No.32 Tahun 2004 BAB III Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, ada 16 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk kabupaten/kota, namun ada urusan pemerintah yang oleh Undang-undang di tentukan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu, Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agama.

Guna mendukung terselenggaranya Otonomi Daerah yang optimal maka diberlakukan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini diatur dalam UU No 33 Tahun 2004. “Desentralisasi *fiscal* yang di atur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari tiga macam, yaitu Pajak Daerah (*Tax Assignment*), Dana Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) dan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus. Dengan desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga Pemerintah Daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kemandirian ini dapat di capai dengan mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari Pajak daerah, Retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah”, seperti di atur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6.

Namun dalam prinsip kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan pemerintah Daerah. Pemerintah pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah, untuk itu Pemerintah Pusat memberikan Dana Perimbangan. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 3 dijelaskan Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan Daerah dan antarpemerintah daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah mampu membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, akan tetapi tidak demikian dengan daerah yang kekurangan sumber daya alamnya, hal tersebut merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Soleh dan Rochmansjah (2010) menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, sedangkan proporsi PAD masih relatif kecil. Adanya Dana Perimbangan melalui DAU ini ternyata justru menjadi ketergantungan. Juga menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, sedangkan proporsi PAD masih relatif kecil. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab.

Prakosa (2007) mengatakan bahwa, dengan adanya transfer dana dari Pemerintah pusat tersebut, bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut

merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai belanja daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di Dalam UU No. 33 Tahun 2004 telah diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal selain melalui Dana Bagi Hasil Pajak dengan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan dan PAD lain-lain yang sah. Dengan melakukan optimalisasi PAD dengan meningkatkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan dan PAD lain-lain yang sah serta mengoptimisasikan Bagi Hasil Pajak diharapkan dapat meningkatkan kemandirian.

Santosa dan Rahayu (2005) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Jumlah Penduduk. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat.

Santosa dan Rahayu (2005) juga mengatakan, Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan segaian lain untuk

kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Santosa dan Rahayu (2005) Mengatakan Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Menurut Sriyana (2011), dalam istilah ekonomi, Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha atau kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri merupakan suatu kegiatan yang mengubah suatu barang secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang jadi dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya.

Provinsi Banten sebagai salah satu Provinsi yang terbentuk setahun sebelum adanya otonomi daerah sehingga diharapkan dapat lebih mampu berinovasi serta mengeksplorasi sumber-sumber alam yang terkandung di wilayahnya. Dan lambat laun ketergantungan kepada pusat dapat dihilangkan

seiring dengan adanya penambahan PAD. Kontribusi PAD memiliki peranan dalam rencana peningkatan kemampuan daerah dari segi keuangan agar tidak harus selalu bergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan representasi pendapatan yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan termasuk dalam 10 kota dengan APBD terbesar di Indonesia. Dan kota Cilegon juga merupakan salah satu dari 10 kota dengan pendapatan perkapita tertinggi di Indonesia.

Tabel 1. 1 PDRB sektor Industri dan PAD di Provinsi Banten Periode 2011-2015 (dalam juta rupiah)

BANTEN	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
PDRB INDUSTRI	Rp113.462.350	Rp118.846.200	Rp128.133.430	Rp130.305.900	Rp134.791.720
PAD	Rp2.895.569.550	Rp3.395.883.040	Rp4.118.551.720	Rp4.899.125.740	Rp4.972.737.620

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2011-2015

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa PDRB sektor industri mengalami peningkatan sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun mengalami peningkatan.

Pada PDRB menurut lapangan usaha, PDRB sektor Industri merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap PDRB setiap daerah. Untuk daerah Banten PDRB sektor industri masih memegang peranan sebagai salah satu sektor yang memiliki andil besar dalam PDRB secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB sektor industri terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Faktor Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten.
2. Untuk menganalisis pengaruh apakah Faktor PDRB sektor industri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten.
3. Untuk menganalisis pengaruh Faktor Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten.
4. Untuk menganalisis pengaruh Faktor Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi penentu kebijakan dalam merencanakan kebijakan dan mampu menerima kritik dan saran guna perbaikan dimasa yang akan datang.
2. Bagi penulis, diharapkan mampu memberi pengalaman mengenai analisis yang dilakukan dan memahami kekurangan serta kelebihan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap sektor industri.
3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat dijadikan referensi bacaan guna memberikan informasi serta tambahan wawasan mengenai hal terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian berupa skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Dalam bab ini disertakan kajian pustaka berupa kajian hasil-hasil penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dengan tema berkaitan dengan apa yang penulis teliti. Bab ini juga membahas mengenai landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis dari berbagai variabel yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis permasalahan yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

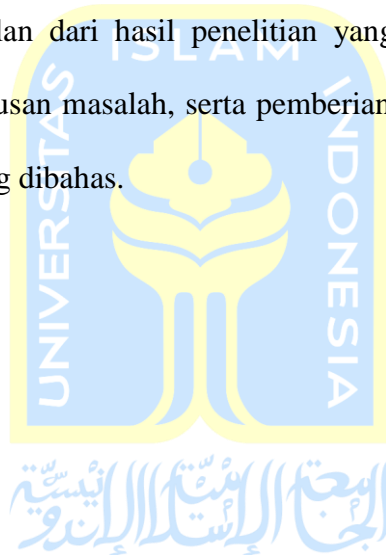
Bab ini menguraikan mengenai jenis dan sumber data, definisi operasional setiap variabel yang digunakan dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai pemaparan hasil regresi yang telah dilakukan untuk menguraikan hasil regresi secara lebih rinci.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban dari rumusan masalah, serta pemberian saran berisi solusi terkait permasalahan yang dibahas.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Sebagai pertimbangan dalam menentukan variabel serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, perlu merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Rani (2016) pada skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” dengan studi kasus di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Periode 2005-2014 ini menjelaskan bahwa Nilai Koefisien Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di karesidenan Eks-Karesidenan Pekalongan sebesar 0.219570 dengan nilai probabilitas 0.0111. ini berarti bila ada kenaikan Pengeluaran Pemerintah sebesar 1% maka akan diikuti dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.219570 atau sebesar 0,21% hal ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah Eks-Karesidenan Pekalongan. Dan juga diketahui bahwa Nilai Koefisien Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/ Kota di karesidenan Eks-Karesidenan Pekalongan sebesar 2.769295 dengan nilai probabilitas 0.0000 signifikan. Ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain itu juga berarti bila ada kenaikan Produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 1 persen maka akan diikuti dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.769295 atau sebesar 2.76 persen, ini menunjukkan bahwa adanya Pengaruh Produk Domestik

Regional Bruto terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.

Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Pendapatan Asli Daerah Merupakan Hubungan yang fungsional karena PDRB merupakan Fungsi Dari PAD. Meningkatnya PDRB makin Menambah Penerimaan Pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai macam program pembangunan, selanjutnya akan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga di diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktifitasnya (Santoso dan Rahayu :2005).

Menurut Transna Putra Urip (2004) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah dan perkembangan ekonomi terhadap PAD di provinsi Papua, menyimpulkan bahwa: pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PAD sebesar 1.051% dan perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,709%.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hertanto dan Sriyana (2011) bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Data yang dianalisis adalah data semua kabupaten dalam kurun waktu 2006-2009, Analisis ini dilakukan dengan metode regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa jumlah industri, jumlah penduduk, dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian ini, bahwa model terbaik untuk

diestimasi adalah model *random effect*. Hasil estimasi model *random effect* menganalisis pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui jumlah industri, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/ota di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap atau konstan. Pengujian pengaruh variabel jumlah industri, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,0251; 0,0145; dan 0,000 yang berarti signifikan untuk pengujian pada α sebesar 0.05. Hasil ini menjelaskan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah sangat tergantung pada peningkatan besaran ketiga variabel tersebut.

Ahmad najib (2006) Dalam skripsinya menjelaskan tentang Analisis Faktor –faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah terhadap PAD pada Kabupaten Karawang. data yang digunakan adalah laporan bulanan Pendapatan Asli Daerah selama satu periode yaitu tahun 2001 – 2005. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda yang kemudian dilakukan uji F dan t yang telah dinyatakan bebas dari uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil

penelitiannya dapat diketahui bahwa keempat variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PAD Kabupaten Karawang.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain (BPS.go.id).

Kewenangan otonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, seperti perencanaan, perizinan, dan pelaksanaan, kecuali kewenangan di bidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter/fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang di atur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi di tingkat provinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas kabupaten dan kota dan kewenangan-kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan daerah otonom kabupaten dan kota, serta kewenangan bidang pemerintahan lainnya (Safitri, 2009). Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Landiyanto, 2005).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu berupa system keuangan daerah yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antar tingkat pemerintahan sesuai dengan pengaturan UU tentang Pemerintahan Daerah. Halim (Abdul dan Ibnu, 2009).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 28, yang dimaksud Kebutuhan fiskal daerah adalah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan yang di maksud Kapasitas Fiskal Daerah adalah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari : Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Safitri, 2009).

2.2.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Yang termasuk urusan wajib adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum
- d. Perumahan rakyat
- e. Penataan ruang
- f. Perencanaan pembangunan
- g. Perhubungan
- h. Lingkungan hidup
- i. Pertanahan
- j. Kependudukan dan catatan sipil
- k. Pemberdayaan perempuan
- l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- m. Sosial
- n. Tenaga kerja



- o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
- p. Penanaman modal
- q. Kebudayaan
- r. Pemuda dan olah raga
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- t. Pemerintahan umum
- u. Kepegawaian
- v. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- w. Statistik
- x. Arsip
- y. Komunikasi dan informatika

Sedangkan yang termasuk dengan urusan pilihan adalah sebagai berikut :

- a. Pertanian
- b. Kehutanan
- c. Pariwisata
- d. Kelautan dan perikanan
- e. Perdagangan
- f. Perindustrian
- g. Transmigrasi.



Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk Klasifikasi belanja menurut fungsi yang

digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

- a. Pelayanan umum
- b. Ketertiban dan ketentraman
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan hidup
- e. Perumahan dan fasilitas umum
- f. Kesehatan
- g. Pariwisata dan budaya
- h. Pendidikan
- i. Perlindungan sosial

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program. Yang termasuk Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal*)

outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorang yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang termasuk belanja langsung adalah :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah,

2) Belanja Modal

Belanja modal untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

3) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dijelaskan Gregory adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari produksi suatu daerah pada periode waktu tertentu. Sisi produksi merubah input faktor produksi tenaga kerja, dan modal menjadi output. Faktor produksi ini juga dilengkapi dengan biaya produksi untuk membayar para tenaga kerja dan bunga sewa pada faktor produksi modal (*factor of payment*) (Mankiw, 2013).

Dalam prakteknya, data PDRB tidak hanya digunakan untuk mengukur besarnya output yang telah dihasilkan, namun juga untuk mengukur kesejahteraan penduduk pada suatu daerah. Kenaikan PDRB akan membuat pendapatan daerah dari sektor pajak, dan retribusinya meningkat. Hal ini akan menyebabkan peningkatan Pendapatan Asli (PAD) pada daerah tersebut. Faktor lain yang digunakan dalam penentuan tingkat upah minimum oleh pemerintah dan Dewan

Pengupahan salah satunya adalah PDRB. Dari peningkatan PDRB terlihat jika produktivitas tenaga kerja pun meningkat, dan akan membuat tingkat upah pekerja seharusnya meningkat pula.

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung nilai PDRB, yaitu:

- 1) Pendekatan produksi. Produksi nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari beberapa sektor perekonomian. 9 sektor tersebut antarlain:
 - a) Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
 - b) Pertambangan dan penggalian
 - c) Industri
 - d) Listrik, gas, dan air
 - e) Bangunan
 - f) Perdagangan, restoran, dan hotel
 - g) Pengangkutan dan komunikasi
 - h) Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
 - i) Jasa lain
- 2) Pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dari berbagai faktor produksi pada proses produksi serta dari berbagai unsur dan jenis pendapatan.

$$Y = U + I + S + L$$

Ket:

Y = Pendapatan nasional (ribuan)

- U = Pendapatan yang diterima tenaga kerja (ribuan)
- I = Pendapatan bunga untuk investor (ribuan)
- S = Pendapatan pemilik faktor produksi modal (tanah) (ribuan)
- L = Pendapatan yang didapatkan oleh pemilik usaha (ribuan)

3) Pengeluaran pemerintah. Pendapatan nasional yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari seluruh permintaan akhir atas output yang telah dihasilkan dan diukur pada harga pasar yang berlaku.

$$Y = C + I + G + (X-m)$$

Ket:

- Y = PDRB (ribuan)
- C = Konsumsi masyarakat (ribuan)
- I = Investasi (ribuan)
- G = Pengeluaran pemerintah (ribuan)
- (X-m) = Ekspor netto (ribuan)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Haryanto,2004).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan (Tarigan, 2008), yaitu :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung neto pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah

tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor neto.

Menurut BPS, cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan Jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara meniai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.
- b. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Adisasmita (2011) berpendapat bahwa indikator yang dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai suatu indikator mengukur pertumbuhan ekonomi adalah:

1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB

mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

2. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang, artinya perhitungagn PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

2.2.4 Pajak Daerah

Prakosa (2003) Menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orangpribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembanguna daerah.

Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000, Pajak Daerah Kota / Kabupaten terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

7. Pajak Parkir.

2.2.5 Industri

Konsep dan Definisi Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling).

Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan balas jasa tertentu.

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu :

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)

4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)

Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009.

Kode baku lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang dihasilkan dengan nilai paling besar. Apabila suatu perusahaan industri menghasilkan 2 jenis komoditi atau lebih dengan nilai yang sama maka produksi utama adalah komoditi yang dihasilkan dengan kuantitas terbesar.

Golongan Pokok :

1. Makanan
2. Minuman
3. Pengolahan tembakau
4. Tekstil
5. Pakaian jadi
6. Kulit, barang dari kulit dan alas kaki

7. Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya
8. Kertas dan barang dari kertas
9. Pencetakan dan reproduksi media rekaman
10. Produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi
11. Bahan kimia dan barang dari bahan kimia
12. Farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
13. Karet, barang dari karet dan plastik
14. Barang galian bukan logam
15. Logam dasar
16. Barang logam, bukan mesin dan peralatannya
17. Komputer, barang elektronik dan dan optik
18. Peralatan listrik
19. Mesin dan perlengkapan ytdl
20. Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer
21. Alat angkutan lainnya
22. Furnitur
23. Pengolahan lainnya
24. Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

2.3 Hubungan Antar Variabel Dependen dengan Variabel Independen

2.3.1 Hubungan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketika meningkatnya Belanja Daerah untuk peningkatan Infrastruktur

daerah akan meningkatkan segala aspek yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD), karena dengan peningkatan infrastruktur akan menarik minat investor untuk datang dan akan meningkatkan PDRB sehingga peningkatan Belanja Daerah akan diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD). Semakin tinggi belanja daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, sehingga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan juga sebaliknya.

2.3.2 Hubungan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau upaya Pendapatan Asli Daerah adalah rasio antara total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) . Jika PDRB meningkat maka kemampuan membayar masyarakat (*ability to pay*) juga meningkat. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Halim, 2011).

2.3.3 Hubungan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang membuktikan bahwa Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar sumber PAD. Oleh karenanya manajemen perpajakan daerah harus mampu menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan PAD, maka semakin besar pula

sekresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi kebutuhan dan prioritas pembangunan.

2.3.4 Hubungan Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan industrialisasi di Indonesia merupakan faktor penting dalam pembentukan pendapatan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir ini sudah sangat banyak sekali industri, mulai dari yang paling kecil hingga industri yang paling besar, dimana setiap industri itu memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar, juga terhadap keuangan negara ini khususnya di daerah-daerah yang banyak memiliki jumlah industri, namun secara tidak langsung juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dengan membuang limbah sembarangan ataupun bisa merugikan negara dengan tidak membayar pajaknya, tapi secara umum sektor perindustrian memberikan nilai menguntungkan, terutama dari sektor industri pengolahan yang mana sektor tersebut sudah memberi kontribusi besar bagi negara ini.

2.4 Hipotesis Penelitian

H1: Di duga ada pengaruh positif antara Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten.

H2 : Di duga ada pengaruh positif antara PDRB sektor industri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten.

H3 : Di duga ada pengaruh positif antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten.

H4 : Di duga ada pengaruh positif antara Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Pengumpulan Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada sampel atau populasi tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2011).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berwujud dalam bentuk angka yang kemudian diolah menggunakan analisis statistik guna menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten. Data sekunder ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesiadengan periode tahun 2011-2015, serta jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan dua macam variabel yang dibagi dalam dua kategori, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai (Y). Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah di Provinsi Banten. Satuan dalam ribu rupiah, Data di ambil dari Data Badan Pusat Statistik tiap kabupaten / kota di Provinsi Banten tahun 2011 – 2015.

3.2.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab atas adanya variabel dependen. Variabel independen dalam analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, yaitu:

1. Variabel X1: Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, APBD ditetapkan dengan peraturan daerah di Provinsi Banten. Dalam hal ini data yang digunakan merupakan data panel yaitu gabungan dari data time series dan data cross section di Provinsi Banten, variabel yang digunakan merupakan Belanja Daerah dengan satuan ribuan rupiah data variabel ini di ambil dari Badan Pusat Statistik tiap kabupaten / kota di Provinsi banten tahun 2011 – 2015.
2. Variabel X2:PDRB Industri adalah Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) di

Provinsi Banten. Dalam hal ini data yang digunakan merupakan data panel yaitu gabungan dari data time series dan data cross section di Provinsi Banten, variabel yang digunakan merupakan PDRB Industri dengan satuan jutaan rupiah data variabel ini di ambil dari Badan Pusat Statistik tiap kabupaten / kota di Provinsi banten tahun 2011 – 2015.

3. Variabel X3: Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD. Dalam hal ini data yang digunakan merupakan data panel yaitu gabungan dari data time series dan data cross section di Provinsi Banten, variabel yang digunakan merupakan Pajak Daerah dengan satuan ribuan rupiah data variabel ini di ambil dari Badan Pusat Statistik tiap kabupaten / kota di Provinsi banten tahun 2011 – 2015.
4. Variabel X4: Industri adalah kegiatan yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa. data yang digunakan merupakan data Jumlah Industri, Dalam hal ini data yang digunakan merupakan data panel yaitu gabungan dari data time series dan data cross section di Provinsi Banten, variabel yang digunakan merupakan Jumlah Industri dengan satuan

unit data variabel ini di ambil dari Badan Pusat Statistik tiap kabupaten / kota di Provinsi banten tahun 2011 – 2015.

3.3 Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan data panel atau biasa disebut regresi model panel. Data panel adalah gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel, dengan metode ini mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Karena itu dengan data panel akan memberikan jumlah data yang semakin banyak sehingga memenuhi prasyarat dan sifat-sifat statistik (Sriyana, Metode Regresi Data Panel, 2014). Menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah yaitu penghilangan variabel.

3.3.1 Model Common Effect

Metode *common effects* merupakan yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Metode yang mempunyai asumsi intersep dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Hal ini dikarenakan dasar yang digunakan dalam regresi data panel ini yang mengabaikan pengaruh individu dan waktu pada model yang dibentuknya. Model ini persamaan regresinya dalam bentuk linear adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Ket:

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Intersep
X1it	= Belanja Daerah(ribuan)
X2it	= PDRB Industri (ribuan)
X3it	= Pajak Daerah (ribuan)
X4it	= Jumlah Industri (unit)
I	= Banyaknya individu/unit observasi (kota/kabupaten di Provinsi Banten)
t	= banyaknya waktu (periode tahun 2011-2015)

3.3.2 Model Fixed Effect

Pada regresi data panel menggunakan metode *common effects* yang mengasumsikan bahwa intersep maupun slope sama baik antar waktu maupun individu. Namun asumsi ini memungkinkan membuat hasil regresi yang jauh berbeda dan hasil estimasi tidak valid. Adanya berbagai faktor yang tidak semuanya masuk ke dalam persamaan dan perbedaan unit observasi memungkinkan intersep yang berbeda begitu juga dengan koefisien regresi atau sloopenya. Maka dari itu selanjutnya terjadi pembentukan model *fixed effects*. Efek tetap dimaksudkan bahwa satu objek observasi memiliki konstanta yang tetap untuk beberapa periode waktu. Demikian juga koefisien regresinya akan tetap dari waktu ke waktu. Maka persamaan model ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i = \beta' X_{it} + e_{it}$$

Ket:

β' = koefisien intersep

Xit = banyaknya data panel (variable)

I = banyaknya individu/unit observasi (kabupaten/kota di Provinsi Banten)

t = banyaknya waktu (periode tahun 2011-2015)

Dalam penggunaan estimasi dengan *least square dummy variable* (LSDV) yang dilakukan untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, yakni dengan memasukkan variabel semu (*dummy variable*). Ini akan menjelaskan terjadinya perbedaan nilai intersep yang berbeda sebagai akibat perbedaan dari *cross section*. Maka persamaan model LSDV akan menjadi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + e_{it}$$

Ket:

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien intersep

X_{1it}, X_{2it} = variabel bebas

D_1, D_2, D_3 = variabel semu dengan bentuk 1 dan 0

I = banyaknya individu/unit observasi (kabupaten/kota di Provinsi Banten)

t = banyaknya waktu (periode tahun 2011-2015)

3.3.3 Model Random Effect

Di dalam mengestimasi data panel dengan model *Fixed Effects* melalui teknik *LSDV* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan variable residual yang dikenal sebagai model *Random Effects*. Model ini perbedaan pada *fixed effects* diakomodasikan dengan *error*. Pada model ini, akan dipilih estimasi data panel dimana error mungkin saling berhubungan koefisien regresi dan konstanta. Oleh karena itu, pada model ini diasumsikan bahwa ada perbedaan intersep untuk

setiap individu dan intersep tersebut merupakan disebabkan oleh residual/error dan secara variable random atau stakastik. Sehingga dalam model ini terdapat dua komponen residual, yaitu residual secara menyeluruh, yang merupakan kombinasi *time series* dan *cross section*, dan residual secara individu yang merupakan karakteristik random dari observasi unit ke-*i* dan tetap sepanjang waktu. Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta'X_{it} + u_i + e_{it}$$

Ket:

β' = koefisien intersep

X_{it} = banyaknya data panel (variable)

μ_i = *random error term*

i = banyaknya individu/unit observasi (kabupaten/kota di Provinsi Banten)

t = banyaknya waktu (periode tahun 2011-2015)

3.3.4 Analisis Data

- 1) Pemilihan Model Regresi: Pemilihan Model dalam pengolahan data yang akan digunakan dalam sebuah penelitian sangat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dugaan yang efisien.

Pengujian pertama dilakukan untuk membandingkan antara *fixed effects* dan *common effects* dengan uji *signifikansi fixed effects*. Jika dari hasil uji pertama ini didapatkan metode *common effects* adalah model terbaik, maka pengujian cukup pada tahap pertama dengan menggunakan metode tersebut. Namun jika hasil pengujian pertama didapatkan hasil metode *fixed effects* adalah model

terbaik, maka dilanjutkan pengujian kedua. Pengujian yang kedua dilakukan untuk membandingkan antara model *fixed effects* dan *random effects* dengan menggunakan uji Hausman. Jika dari hasil uji pertama ini didapatkan metode *fixed effects* adalah model terbaik, maka pengujian cukup pada tahap pertama dengan menggunakan metode tersebut. Namun jika hasil pengujian pertama didapatkan hasil metode *random effects* adalah model terbaik, maka gunakanlah metode tersebut. Terdapat tiga uji yang dapat dilakukan untuk menentukan penggunaan metode estimasi yang terbaik, yaitu:

a) Uji *Chow Test*

Uji *chow test* dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *common effects* atau *fixed effects*. Hipotesis dari chow test adalah:

H₀: $F \text{ stat} \leq F \text{ tabel}$, maka model *common effects* yang valid digunakan.

H₁: $F \text{ stat} > F \text{ tabel}$, maka model *fixed effects* yang valid digunakan.

b) Uji *Lagrange Multiplier (LM)*

Sebelumnya, harus dilakukan uji signifikansi terlebih dahulu pada model *random effects*. Uji LM ini dilakukan untuk mengetahui pendekatan mana yang lebih baik antara *random effects* atau *common effects*.

H₀: $LM \text{ hitung} \leq \chi^2 \text{ (Chi Square) tabel}$, maka model *common effects* yang valid digunakan.

H₁: $LM \text{ hitung} > \chi^2 \text{ (Chi Square) tabel}$, maka model *random effects* yang valid digunakan.

c) Uji *Hausman Test*

Uji ini selanjutnya membahas tentang pemilihan metode yang terbaik antara *fixed effects* dan *random effects*. Uji Hausman dilakukan dengan menggunakan alat bantu Eviews. Untuk melakukan uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Model *Random Effects*

H₁: Model *Fixed Effects*

2) Uji Statistik

a) Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak variable independen terhadap variable dependen secara individu. Uji ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Jika hipotesis signifikan positif, maka:

$$H_0 : \beta_i \leq 0$$

$$H_1 : \beta_i > 0$$

Jika hipotesis signifikan negatif, maka:

$$H_0 : \beta_i \geq 0$$

$$H_1 : \beta_i < 0$$

Menentukan tingkat signifikan (α) 5%

Kriteria Pengujian:

Jika nilai Prob. T-statistic > 0.05 , maka H₀ diterima, artinya variable bebas tidak mempengaruhi variable terikat secara signifikan. Jika nilai Prob. T-statistic < 0.05 , maka H₀ ditolak, artinya variable bebas mempengaruhi variable terikat secara signifikan.

b) Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak variable-variable independen terhadap variable dependen secara menyeluruh. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis maka variable-variable dependen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variable dependen. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H1 : Minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol

Dengan membandingkan nilai prob f-stat dengan α (5%), jika prob f-stat $< \alpha$ maka menolak H_0 , yang artinya variabel independen secara menyeluruh mempengaruhi variable dependen. Sebaliknya apabila prob f-stat $> \alpha$ maka gagal menolak H_0 maka variable independen secara menyeluruh tidak mempengaruhi variable dependen.

3.4 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti di Provinsi Banten, peneliti memilih lokasi ini karena ingin tahu bagaimana Pendapatan Asli Daerah yang terjadi di Provinsi Banten dari tahun 2011 sampai 2015. Karena Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan termasuk dalam 10 kota dengan APBD terbesar di Indonesia. Dan kota Cilegon juga merupakan salah satu dari 10 kota dengan pendapatan perkapita tertinggi di Indonesia.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil analisis dari APBD, PDRB Industri, Pajak Daerah dan Jumlah Industri di kabupaten/kota pada Provinsi Banten pada tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode regresi panel dengan menggabungkan data *time series* dan data *cross section*. Data yang digunakan berjumlah 5 tahun berurutan dari tahun 2011-2015 dengan mencakup 8 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten.

4.2 Deskripsi Objek Data Penelitian

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain (BPS.go.id). Kewenangan otonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, seperti perencanaan, perizinan, dan pelaksanaan, kecuali kewenangan di bidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter/fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang di atur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi di tingkat provinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas kabupaten dan kota dan kewenangan-kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan daerah otonom kabupaten dan kota, serta kewenangan bidang pemerintahan lainnya (Safitri,

2009). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 28, yang dimaksud Kebutuhan fiskal daerah adalah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan yang di maksud Kapasitas Fiskal Daerah adalah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari : Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Data yang digunakan yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011-2015 per kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dimana Provinsi Banten memiliki 4 kabupaten dan 4 kota yaitu Kabupaten Serang, Kota serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon.

**Tabel 4. 1 PAD per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2011-2015
(Juta Rupiah)**

KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
KAB SERANG	946389.9892	1476369.4	1731722.101	2912068.317	2304837.742
KOTA SERANG	800168.2308	829740.7764	869332.5669	1024512.303	1105658.801
KAB LEBAK	1185076.007	1291289.884	1475432.194	1796231.788	2211644.381
KAB PANDEGLANG	1121892	1345730.83	1541836.43	1747029.49	2053864.86
KAB TANGERANG	2224307.77	2807561.759	3069860.835	3109789.676	3249008.698
KOTA TANGERANG	4996000	6315190	8157330	12587980	14720490
KOTA TANGSEL	131500.021	420663.049	576304.771	728976.3921	1023817.429
KOTA CILEGON	685599.4529	858320.9733	1055817.675	1096751.657	1304400.904

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tahun 2011-2015

4.2.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, “Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Belanja Daerah di Setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dalam bentuk satuan milyar Rupiah pada periode tahun 2011-2015.

**Tabel 4. 2 Belanja Daerah per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun
2011-2015 (Juta Rupiah)**

KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
KAB SERANG	991752.7578	1413896.049	2057457.4	1909367.172	2342220.891
KOTA SERANG	778976.9006	809769.9004	864285.9813	949970.1421	1061917.793
KAB LEBAK	1172211.338	1274592.541	1514838.643	1725537.969	2329698.498
KAB PANDEGLANG	1177381.26	1266816.38	1530136.05	1640017.3	2000387.65
KAB TANGERANG	2027969.74	2856284.934	3491153.787	4179069.902	4867750.688
KOTA TANGERANG	1653673	1925246	2766418	2657440	3101047
KOTA TANGSEL	727048.024	1289438.935	1271356.894	1789444.006	2086050.951
KOTA CILEGON	641205.9948	839320.9733	874678.1083	1002342.557	1222804.815

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tahun 2011-2015

4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto sektor Industri

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto dari penjelasan Gregory Mankiw adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Peningkatan output PDRB merupakan sebuah pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. PDRB digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk mengukur kinerja keseluruhan yang jumlahnya. Peneliti menggunakan data PDRB sektor Industri dalam penelitian ini.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut (BPS.go.id) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB sektor Industri di Setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dalam bentuk satuan milyar Rupiah pada periode tahun 2011-2015.

**Tabel 4. 3 PDRB Industri per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun
2011-2015 (Juta Rupiah)**

KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
KAB SERANG	1.970.709.000,00	1.979.568.000,00	2.109.008.000,00	2.176.399.000,00	2.292.890.000,00
KOTA SERANG	72.434.281,00	75.100.868,00	81.109.505,00	87.955.719,00	90.636.615,00
KAB LEBAK	1.601.045,08	1.713.323,42	1.825.499,08	1.848.228,13	1.791.418,42
KAB PANDEGLANG	926.247,00	986.584,00	1.057.053,00	1.115.481,00	1.189.070,00
KAB TANGERANG	2.724.383.018,00	2.852.212.838,00	3.058.673.898,00	3.083.615.849,00	3.162.240.758,00
KOTA TANGERANG	2.964.288.543,00	3.151.861.799,00	3.389.739.764,00	3.400.778.919,00	3.504.995.902,00
KOTA TANGSEL	4.132.064.250,00	4.161.968.340,00	4.509.224.370,00	4.822.698.620,00	5.007.025.790,00
KOTA CILEGON	2.952.601.133,00	3.145.464.723,00	3.455.901.623,00	3.545.530.501,00	3.682.004.356,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tahun 2011-2015

4.2.4 Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah dari penjelasan Prakoso adalah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembanguna daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pajak Daerah di Setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dalam bentuk satuan milyar Rupiah pada periode tahun 2011-2015.

Tabel 4. 4 Pajak Daerah per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
KAB SERANG	41649.81922	123557.0051	198727.5	244298.728	295713.825
KOTA SERANG	32678.59439	41565.29872	45129.97919	67029.48444	76483.00124
KAB LEBAK	14041.07826	22667.69102	20943.04099	51035.6212	47579.65412
KAB PANDEGLANG	6620.55	8135.01	2004.766	2115.632	3000.547
KAB TANGERANG	426863.51	556000	800441.1638	984079	1162520.779
KOTA TANGERANG	418529	516453	643426	1061476	1172374
KOTA TANGSEL	89983.231	37842.0418	48736.41451	60734.87257	86457.6346
KOTA CILEGON	84928.18086	172965.16	147686.6426	177144.9722	340323.4358

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tahun 2011-2015

4.2.5 Industri

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Jumlah Industri di Setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dalam bentuk satuan unit pada periode tahun 2011-2015.

Tabel 4. 5 Jumlah Industri per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2011-2015 (Unit)

KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
KAB SERANG	144	144	156	148	159
KOTA SERANG	23	21	20	22	19
KAB LEBAK	16	17	18	20	19
KAB PANDEGLANG	12	12	10	13	10
KAB TANGERANG	689	682	713	782	740
KOTA TANGERANG	563	555	626	559	641
KOTA TANGSEL	59	62	58	57	59
KOTA CILEGON	77	77	73	81	73

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tahun 2011-2015

4.3 Persamaan Regresi

Hubungan antara Belanja Daerah, PDRB Industri, Pajak Daerah, dan Jumlah Industri dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Banten dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan:

$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Belanja_Daerah}_{it} + \beta_2 \text{PDRB_Industri}_{it} + \beta_3 \text{Pajak_Daerah}_{it} + \beta_4 \text{Jumlah_Industri}_{it} + \text{uit}$$

Dimana:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Belanja Daerah
3. PDRB Industri
4. Pajak Daerah
5. Jumlah Industri

i = Banyaknya individu/unit observasi (8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten)

t = Banyaknya waktu (periode 2011-2015)

4.4 Hasil Estimasi Regresi

4.4.1 Pemilihan Model

Karena penelitian ini menggunakan regresi data panel, maka diharuskan untuk menentukan model pendekatan analisis untuk menemukan model yang paling tepat untuk pengujian selanjutnya. Model yang diuji antara lain adalah *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Pengujian pertama menggunakan uji-*chow* untuk memilih antara model *common effect* atau *fixed effect*. Lalu yang kedua dilakukan uji-*Hausman* untuk memilih antara *fixed effect* dan *random effect*.

4.4.2 Likelihood Ratio Test (Chow Test)

Uji-*Chow* dilakukan untuk memilih model terbaik yang digunakan antara *common effect* atau *fixed effect*. Hipotesis dari uji-*Chow* sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect* valid untuk digunakan

H_1 : *Fixed Effect* valid untuk digunakan

Menolak hipotesis H_0 terjadi ketika nilai probabilitas $F < \text{Alpha } 0.05$, ini berarti model *fixed effect* lebih baik untuk digunakan. Sebaliknya, jika gagal menolak H_0 maka menerima hipotesis H_1 dan model *common effect* yang lebih baik digunakan.

Tabel 4. 6 Hasil dari Likelihood Ratio Test (Chow Test)

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: POOL			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	23.550206	(8,32)	0.0000
Cross-section Chi-square	86.837204	8	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan *E-Views 8*.

Dari hasil pengujian pada tabel 4.6 diperoleh nilai probabilitas dari *cross section F* sebesar $0,0000 < \alpha 0,05$. Maka hasil dari uji ini adalah menolak H_0 , yang berarti model *Fixed Effect* lebih baik digunakan.

4.4.3 Hausman Test

Uji-*Hausman* dilakukan untuk memilih model terbaik yang digunakan antara *Fixed effect* atau *Random effect*. Hipotesis dari uji-*Hausman* sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect* valid untuk digunakan

H_1 : *Fixed Effect* valid untuk digunakan

Menolak hipotesis H_0 terjadi ketika nilai probabilitas $F < \alpha 0.05$, ini berarti model *Fixed effect* lebih baik untuk digunakan. Sebaliknya, jika gagal menolak H_0 maka menerima hipotesis H_1 dan model *Random effect* yang lebih baik digunakan.

Tabel 4. 7 Hasil dari Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: POOL			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.255990	4	0.0003

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan *E-views 8*.

Dari hasil pengujian pada tabel 4.2 diperoleh nilai probabilitas dari *cross section* F sebesar $0,00003 < \alpha 0,05$. Maka hasil dari uji ini adalah menolak H_0 , yang berarti model *Fixed Effect* lebih baik digunakan.

4.5 Model Regresi Terbaik

4.5.1 Model Random Effect

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada uji *chow* dan uji *hausman* di atas, dapat diketahui dan dipilih model terbaik yang akan digunakan untuk analisis. Model yang digunakan adalah regresi model *fixed effect*. Akan tetapi, hasil dari *fixed effect model* tidaklah bagus, sehingga penulis memutuskan untuk memasukkan hasil regresi dari *random effect model*.

Tabel 4. 8 Hasil Regresi Model Random Effect

Dependent Variable: LOG(Y?)				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 02/14/18 Time: 21:28				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 9				
Total pool (balanced) observations: 45				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.761964	1.858840	-0.409914	0.6841
LOG(X1?)	1.092970	0.131025	8.341658	0.0000
LOG(X2?)	-0.101767	0.054206	-1.877417	0.0678
LOG(X3?)	0.027228	0.069913	0.389452	0.6990
LOG(X4?)	0.263756	0.127387	2.070506	0.0449
R-squared	0.707038	Mean dependent var	4.251950	
Adjusted R-squared	0.677741	S.D. dependent var	0.426066	
S.E. of regression	0.241868	Sum squared resid	2.340009	
F-statistic	24.13408	Durbin-Watson stat	1.191954	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.650671	Mean dependent var	14.29660	
Sum squared resid	11.11610	Durbin-Watson stat	0.250914	

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan *E-views 8*.

Dari hasil pengolahan regresi data panel diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-Squared) dari hasil estimasi sebesar 0.707038, yang menunjukkan variabel-variabel independen mampu menjelaskan 70,70% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan diluar model.

Tabel 4. 9 Ringkasan Estimasi Hasil Output Regresi Data Panel

Variable	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
Belanja Daerah	0,495745**	1,186715***	1,09297***
PDRB Industri	-0,215065***	0,238096	0,101767*
Pajak Daerah	0,1924*	-0,025898	0,027228
Jumlah Industri	0,433034***	-0,534292	0,263756**

Sumber: Hasil pengolahan dengan *E-views 8*

Keterangan : *** Signifikan pada $\alpha = 1\%$

** Signifikan pada $\alpha = 5\%$

* Signifikan pada $\alpha = 10\%$

4.6 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pemilihan model yang telah dilakukan, maka model Random Effect terpilih menjadi model yang terbaik untuk mengestimasi.

Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob.	Keterangan
BELANJA DAERAH	1,092970	8,341658	0,0000	Signifikan
PDRB INDUSTRI	-0,101767	-1,877417	0,0678	Signifikan
PAJAK DAERAH	0,027228	0,389452	0,6990	Tidak Signifikan
JUMLAH INDUSTRI	0,263756	2,070506	0,0449	Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan *E-views 8*.

4.6.1 Uji T (Pengujian Variabel Secara Individu)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.

1. Belanja Daerah

Berdasarkan hasil diatas, Belanja Daerah mempunyai nilai koefisien 1,092970, dengan nilai t-statistic 8,341658 dan Probabilitasnya 0,0000. Dimana nilai $prob < \alpha$ (5%) yang artinya signifikan dan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. PDRB Industri

Berdasarkan hasil diatas, PDRB Industri mempunyai nilai koefisien -0,101767, dengan nilai t-statistic -1,877417 dan Probabilitasnya 0,0678.

Dimana nilai $\text{prob} < \alpha$ (10%) yang artinya signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Pajak Daerah

Berdasarkan hasil diatas, Pajak Daerah mempunyai nilai koefisien - 0,027228, dengan nilai t-statistic 0,389452 dan Probabilitasnya 0,6990. Dimana nilai $\text{prob} > \alpha$ (5%) yang artinya tidak signifikan signifikan dan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Jumlah Industri

Berdasarkan hasil diatas, Jumlah Industri mempunyai nilai koefisien 0,263756, dengan nilai t-statistic 2,070506 dan Probabilitasnya 0,0449. Dimana nilai $\text{prob} > \alpha$ (5%) yang artinya tidak signifikan signifikan dan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.6.2 Uji Signifikansi Bersama (Uji F)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Berdasarkan hasil diatas diperoleh f statistic sebesar 24,13408 dengan probabilitas f statistiknya sebesar $0.000000 < \alpha$ 5%, yang artinya H_0 ditolak. Variable independen yaitu Belanja Daerah, PDRB Industri, Pajak Daerah dan Jumlah Industri secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap variable dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Industri.

4.6.3 Koefisien Determinasi R^2

Hasil regresi diatas menunjukkan hasil nilai koefisien R^2 sebesar 0,707038 yang artinya variable independen yaitu Belanja Daerah, PDRB Industri, Pajak

Daerah, dan Jumlah Industri mampu menjelaskan variable dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 70,70%. Sedangkan sisanya 0,292962% dijelaskan oleh variable lain diluar model.

4.7 Interpretasi Hasil Analisis

4.7.1 Analisis Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis data diatas, diperoleh model yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah menggunakan model Random Effect. Dari hasil pengujian model *Random Effect* dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah signifikan dan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten.

Tabel 4. 11 Koefisien antar Kabupaten/Kota

KABUPATEN/KOTA	COEFFICIENT
KAB. SERANG	0,013203
KOTA SERANG	0,254829
KAB. LEBAK	-0,130593
KAB. PANDEGLANG	0,008157
KAB. TANGERANG	-0,609389
KOTA TANGERANG	0,799225
KOTA TANGSEL	-0,646900
KOTA CILEGON	0,298264

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Office Excel 2007

Pada tabel 4.11 di atas menunjukkan nilai koefisien dari masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten tahun 2011-2015. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari sisi wilayahnya di Provinsi Banten memiliki pengaruh

yang berbeda-beda terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah(PAD) di setiap Kabupaten/Kota.

1. Kabupaten Serang

Variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar $-0,761964$ dan dilihat dari koefisien yang dimiliki Kabupaten Serang sebesar $0,013203$ yang menandakan bahwa setiap terjadi perubahan 1% terhadap variabel Independen akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,013203$.

2. Kota Serang

Variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar $-0,761964$ dan dilihat dari koefisien yang dimiliki Kota Serang sebesar $0,254829$ yang menandakan bahwa setiap terjadi perubahan 1% terhadap variabel Independen akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,254829$.

3. Kabupaten Lebak

Variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar $-0,761964$ dan dilihat dari koefisien yang dimiliki Kabupaten Lebak sebesar $-0,130593$ yang menandakan bahwa setiap terjadi perubahan 1% terhadap variabel Independen akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah sebesar $-0,130593$.

4. Kabupaten Pandeglang

Variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar $-0,761964$ dan dilihat dari koefisien yang dimiliki

Kabupaten Pandeglang sebesar 0,008157 yang menandakan bahwa setiap terjadi perubahan 1% terhadap variabel Independen akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,008157.

5. Kabupaten Tangerang

Variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar -0,761964 dan dilihat dari koefisien yang dimiliki Kabupaten Tangerang sebesar -0,609389 yang menandakan bahwa setiap terjadi perubahan 1% terhadap variabel Independen akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah sebesar -0,609389.

6. Kota Tangerang

Variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar -0,761964 dan dilihat dari koefisien yang dimiliki Kota Tangerang sebesar 0,799225 yang menandakan bahwa setiap terjadi perubahan 1% terhadap variabel Independen akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,799225.

7. Kota Tangerang Selatan

Variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar -0,761964 dan dilihat dari koefisien yang dimiliki Kota Tangerang Selatan sebesar -0,646900 yang menandakan bahwa setiap terjadi perubahan 1% terhadap variabel Independen akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah sebesar -0,646900.

8. Kota Cilegon

Variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar -0,761964 dan dilihat dari koefisien yang dimiliki Kota Cilegon sebesar 0,298264 yang menandakan bahwa setiap terjadi perubahan 1% terhadap variabel Independen akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,298264.

4.7.2 Analisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten.

Hasil regresi data panel pada penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya Belanja Daerah yang dilakukan signifikan berpengaruh pada penentuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten. Diketahui bahwa koefisien regresi Belanja Daerah adalah sebesar 1,092970 dan nilai probabilitasnya 0.0000. Ketika terjadi kenaikan Belanja Daerah maka akan diikuti dengan perubahan peningkatan juga pada Pendapatan Asli Daerah provinsinya.

Dari penjelasan diatas, analisis ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga meningkatnya Belanja Daerah diikuti dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat semakin tinggi daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanyadan dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Meningkatnya Belanja Daerah yang dikeluarkan untuk pembangunan daerah akan meningkatkan infrastruktur yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga semakin menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat semakin meningkat sehingga

memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung terhadap pemerintah pusat, sehingga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan juga sebaliknya (Argi, 2011).

4.7.3 Analisis Pengaruh PDRB Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten

Hasil regresi data panel pada penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya PDRB Industri yang dilakukan signifikan dan berpengaruh pada penentuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten. Diketahui bahwa koefisien regresi PDRB Industri adalah sebesar $-0,101767$ dan nilai probabilitasnya $0,0678$. Analisis ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merefleksikan peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Hertanto dan Sriyana, 2013).

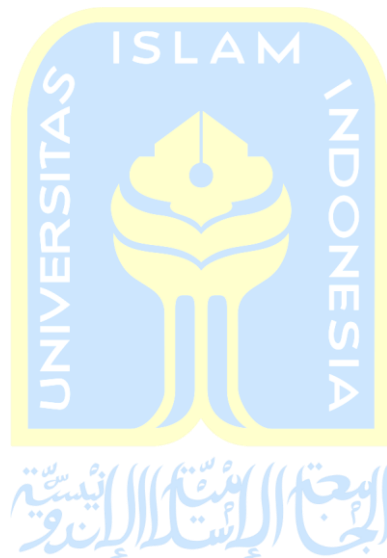
4.7.4 Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten

Hasil regresi data panel pada penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya Pajak Daerah yang didapat tidak signifikan dan tidak berpengaruh pada penentuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten. Diketahui bahwa koefisien regresi Pajak Daerah adalah sebesar 0,027228 dan nilai probabilitasnya 0.6990. Analisis ini tidak sesuai dengan penelitian yang dijelaskan oleh (Asteria, 2015). Bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga meningkatnya Pajak Daerah tidak diikuti dengan meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah yang didapat masing-masing daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten tidak sama dan ada *Gap* antar daerah yang lumayan jauh sehingga memungkinkan penerimaan pajak daerah pada tiap daerah memiliki perbedaan yang terlalu signifikan yang menyebabkan perbedaan yang besar.

4.7.5 Analisis Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten

Hasil regresi data panel pada penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Industri signifikan dan berpengaruh pada penentuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten. Diketahui bahwa koefisien regresi Jumlah Industri adalah sebesar 0,263756 dan nilai probabilitasnya 0.0449. Analisis ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya.

Perkembangan industrialisasi di Indonesia juga merupakan faktor penting dalam pembentukan pendapatan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir ini sudah banyak sekali industri, mulai dari industri yang paling kecil hingga industri yang paling besar, dimana setiap industri ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat skitar, juga terhadap keuangan negara. Dan secara umum sektor perindustrian sangat memberikan nilai menguntungkan, terutama dari sektor industri pengolahan yang mana sektor tersebut sudah cukup memberi kontribusi besar bagi negara ini (Hertanto dan Sriyana, 2013).



BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis menggunakan *e-views 8* terhadap hiootesis yang telah disusun dan diatur sebelumnya. Hal yang dapat disimpulkan dan didapat dari penelitian ini adalah:

- 1) Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan ketika terjadi peningkatan Belanja Daerah akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten.
- 2) Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa PDRB Industri signifikan dan berpengaruh secara negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan ketika terjadi peningkatan pada PDRB Industri akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten.
- 3) Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan atau penurunan Pajak Daerah tidak akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten.
- 4) Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Jumlah Industri signifikan dan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini

menunjukkan ketika terjadi peningkatan pada Jumlah Industri akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten.

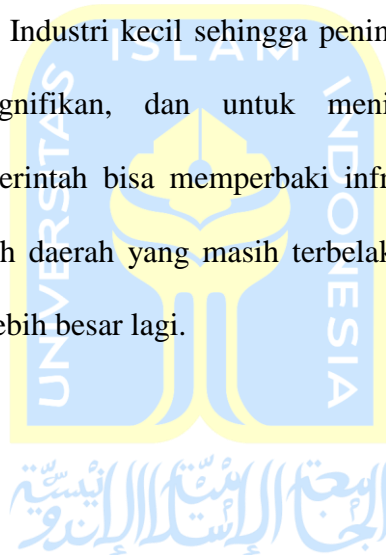
5.2 Implikasi

Dari hasil analisis Belanja Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri, Pajak Daerah, dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten pada periode tahun 2011-2015 sehingga didapatkan beberapa implikasi, yaitu:

- 1) Pemerintah perlu untuk menyesuaikan Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima agar tetap terjadi keseimbangan dari sektor penerimaan dengan pengeluaran daerah yang digunakan pada tiap daerahnya.
- 2) Pemerintah diharapkan mampu untuk memperhatikan PDRB sektor Industri yang terjadi di Provinsi Banten terutama pada daerah-daerah tertentu yang PDRB Industri nya masih rendah dengan pemerataan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan sektor Industri yang lebih baik lagi.
- 3) Pemerintah perlu mencari solusi terhadap Pajak Daerah yang tidak mencapai targetnya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. Dan juga pemerintah mendukung dan memberikan peluang seluas-luasnya terhadap perkembangan dunia usaha.
- 4) Pemerintah diharapkan mampu untuk memperhatikan Jumlah Industri yang ada di Provinsi Banten terutama pada daerah-daerah tertentu yang

Jumlah Industri nya masih rendah dengan pemerataan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan sektor Industri yang lebih baik lagi. Karena tiap daerah memiliki Jumlah Industri yang berbeda-beda sehingga pembangunan cenderung terjadi di daerah kabupaten/kota yang lebih maju sehingga memiliki Jumlah Industri yang lebih banyak.

- 5) Pemerintah mampu untuk menarik minat investor guna meningkatkan jumlah industri di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang yang masih memiliki jumlah Industri sedikit dan cenderung berupa Industri kecil sehingga peningkatan PDRB Industrinya tidak terlalu signifikan, dan untuk meningkatkan pajak daerah kedepannya. Pemerintah bisa memperbaiki infrastruktur untuk menarik investor menjamah daerah yang masih terbelakang tersebut untuk digali potensi alamnya lebih besar lagi.



DAFTAR PUSTAKA

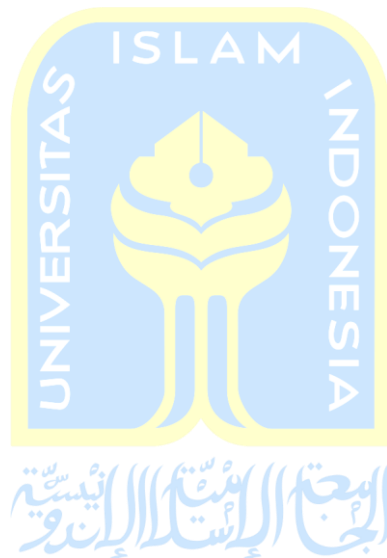
- Abdul Halim & Mujib Ibnu. 2009. *“Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah”*. Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Argi, Ridho. 2011. *“Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Asteria, Beta. 2015. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen*. Vol.2, no. 1. Hal 51-61.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Banten Dalam Angka 2011*, Banten, 2011.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Banten Dalam Angka 2012*, Banten, 2012.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Banten Dalam Angka 2013*, Banten, 2013.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Banten Dalam Angka 2014*, Banten, 2014.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Banten Dalam Angka 2015*, Banten, 2015.
- Haryanto. 2004. *“Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analisis”*. Jurnal Departemen Keuangan.
- Hertanto, Indrajati dan Jaka Sriyana. 2011. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vo. 12, no.1. hal 76-89.
- Landiyanto, 2005, *“Kinerja Keuangan dan Setrategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah”*, CURES working paper No 05/01
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rani, Hening Fitria Sarasati El. 2016. *“Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” studi kasus di Kabupaten/kota eks-Karesidenan Pekalongan periode 2005-2014*. [jurnal] Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Santoso dan Rahayu. 2005. *“Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri”*. *Dinamika Pembangunan* Vol.2. No.1. Hal 9-18.

Sholeh dan Rochmansjah. 2010. *“Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah”*. Bandung. Fokus media

Tarigan, Robinson, 2008, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi Revisi kedua, PT Bumi Aksara, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.



LAMPIRAN

Lampiran 1 DATA PENELITIAN

KABUPATEN & KOTA	TAHUN	PAD (RUPIAH)	BELANJA DAERAH (RUPIAH)	PDRB IDUSTRI (JUTA RUPIAH)	PAJAK DAERAH (RUPIAH)	JUMLAH INDUSTRI (UNIT)
KAB. SERANG	2011	946.389.989.171,00	991.752.757.790,00	1.970.709.000,00	41.649.819.223,00	144
	2012	1.476.369.400.157,00	1.413.896.049.316,00	1.979.568.000,00	123.557.005.095,00	144
	2013	1.731.722.100.980,00	2.057.457.400.152,00	2.109.008.000,00	198.727.500.000,00	156
	2014	2.912.068.317.000,00	1.909.367.172.000,00	2.176.399.000,00	244.298.728.000,00	148
	2015	2.304.837.741.509,00	2.342.220.890.626,00	2.292.890.000,00	295.713.824.970,00	159
KOTA SERANG	2011	800.168.230.824,00	778.976.900.560,00	72.434.281,00	32.678.594.390,00	23
	2012	829.740.776.401,00	809.769.900.423,00	75.100.868,00	41.565.298.717,00	21
	2013	869.332.566.869,00	864.285.981.277,00	81.109.505,00	45.129.979.193,00	20
	2014	1.024.512.302.967,00	949.970.142.088,00	87.955.719,00	67.029.484.443,00	22
	2015	1.105.658.800.589,00	1.061.917.792.736,00	90.636.615,00	76.483.001.239,00	19
KAB. LEBAK	2011	1.185.076.007.124,00	1.172.211.338.158,00	1.601.045,08	14.041.078.255,00	16
	2012	1.291.289.884.478,00	1.274.592.540.523,00	1.713.323,42	22.667.691.016,00	17
	2013	1.475.432.194.169,00	1.514.838.642.901,00	1.825.499,08	20.943.040.987,00	18
	2014	1.796.231.788.248,00	1.725.537.969.208,00	1.848.228,13	51.035.621.198,00	20
	2015	2.211.644.380.758,00	2.329.698.497.897,00	1.791.418,42	47.579.654.116,00	19
KAB. PANDEGLANG	2011	1.121.892.000.000,00	1.177.381.260.000,00	926.247,00	6.620.550.000,00	12
	2012	1.345.730.830.000,00	1.266.816.380.000,00	986.584,00	8.135.010.000,00	12
	2013	1.541.836.430.000,00	1.530.136.050.000,00	1.057.053,00	2.004.766.000,00	10
	2014	1.747.029.490.000,00	1.640.017.300.000,00	1.115.481,00	2.115.632.000,00	13

	2015	2.053.864.860.000,00	2.000.387.650.000,00	1.189.070,00	3.000.547.000,00	10
KAB. TANGERANG	2011	2.224.307.770.000,00	2.027.969.740.000,00	2.724.383.018,00	426.863.510.000,00	689
	2012	2.807.561.759.056,00	2.856.284.934.222,00	2.852.212.838,00	556.000.000.000,00	682
	2013	3.069.860.834.964,00	3.491.153.786.828,00	3.058.673.898,00	800.441.163.804,00	713
	2014	3.109.789.675.990,00	4.179.069.902.000,00	3.083.615.849,00	984.079.000.000,00	782
	2015	3.249.008.697.680,00	4.867.750.688.000,00	3.162.240.758,00	1.162.520.779.000,00	740
KOTA TANGERANG	2011	4.996.000.000.000,00	1.653.673.000.000,00	2.964.288.543,00	418.529.000.000,00	563
	2012	6.315.190.000.000,00	1.925.246.000.000,00	3.151.861.799,00	516.453.000.000,00	555
	2013	8.157.330.000.000,00	2.766.418.000.000,00	3.389.739.764,00	643.426.000.000,00	626
	2014	12.587.980.000.000,00	2.657.440.000.000,00	3.400.778.919,00	1.061.476.000.000,00	559
	2015	14.720.490.000.000,00	3.101.047.000.000,00	3.504.995.902,00	1.172.374.000.000,00	641
KOTA TANGSEL	2011	131.500.021.000,00	727.048.024.000,00	4.132.064.250,00	89.983.231.000,00	59
	2012	420.663.049.000,00	1.289.438.935.000,00	4.161.968.340,00	37.842.041.800,00	62
	2013	576.304.771.005,00	1.271.356.893.860,00	4.509.224.370,00	48.736.414.509,00	58
	2014	728.976.392.072,00	1.789.444.006.260,00	4.822.698.620,00	60.734.872.567,00	57
	2015	1.023.817.429.319,00	2.086.050.950.946,00	5.007.025.790,00	86.457.634.601,00	59
KOTA CILEGON	2011	685.599.452.905,00	641.205.994.820,00	2.952.601.133,00	172.965.160.026,00	77
	2012	858.320.973.326,00	839.320.973.326,00	3.145.464.723,00	147.686.642.561,00	77
	2013	1.055.817.674.639,00	874.678.108.336,00	3.455.901.623,00	177.144.972.228,00	73
	2014	1.096.751.657.161,00	1.002.342.556.838,00	3.545.530.501,00	340.323.435.803,00	81
	2015	1.304.400.904.200,00	1.222.804.814.553,00	3.682.004.356,00	412.600.922.492,00	73

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tahun 2011-2015

Lampiran 2 HASIL REGRESI COMMON EFFECT MODEL

Dependent Variable: LOG(Y?)				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 02/14/18 Time: 21:25				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 9				
Total pool (balanced) observations: 45				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.340047	3.437140	2.135510	0.0389
LOG(X1?)	0.495745	0.230472	2.151001	0.0376
LOG(X2?)	-0.215065	0.047769	-4.502219	0.0001
LOG(X3?)	0.192400	0.099551	1.932675	0.0604
LOG(X4?)	0.433034	0.145212	2.982074	0.0049
R-squared	0.716930	Mean dependent var	14.29660	
Adjusted R-squared	0.688623	S.D. dependent var	0.850418	
S.E. of regression	0.474543	Akaike info criterion	1.451511	
Sum squared resid	9.007650	Schwarz criterion	1.652251	
Log likelihood	-27.65900	Hannan-Quinn criter.	1.526345	
F-statistic	25.32697	Durbin-Watson stat	0.362318	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Olah Data *E-Views* 8

الجامعة الإسلامية
بالتبليغ

Lampiran 3 HASIL REGRESI RANDOM EFFECT MODEL

Dependent Variable: LOG(Y?)				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 02/14/18 Time: 21:28				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 9				
Total pool (balanced) observations: 45				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.761964	1.858840	-0.409914	0.6841
LOG(X1?)	1.092970	0.131025	8.341658	0.0000
LOG(X2?)	-0.101767	0.054206	-1.877417	0.0678
LOG(X3?)	0.027228	0.069913	0.389452	0.6990
LOG(X4?)	0.263756	0.127387	2.070506	0.0449
Random Effects (Cross)				
_KAB_LEBAK--C	-0.130593			
_KAB_PANDEGLANG--C	0.008157			
_KAB_SERANG--C	0.013203			
_KAB_SERANG--C	0.013203			
_KAB_TANGERANG--C	-0.609389			
_KOTA_CILEGON--C	0.298264			
_KOTA_SERANG--C	0.254829			
_KOTA_TANGERANG--C	0.799225			
_KOTA_TANGSEL--C	-0.646900			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.290234	0.6733
Idiosyncratic random			0.202161	0.3267
Weighted Statistics				
R-squared	0.707038	Mean dependent var	4.251950	
Adjusted R-squared	0.677741	S.D. dependent var	0.426066	
S.E. of regression	0.241868	Sum squared resid	2.340009	
F-statistic	24.13408	Durbin-Watson stat	1.191954	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.650671	Mean dependent var	14.29660	
Sum squared resid	11.11610	Durbin-Watson stat	0.250914	

Sumber : Olah Data E-Views 8

Lampiran 4 HASIL REGRESI FIXED EFFECT MODEL

Dependent Variable: LOG(Y?)				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 02/14/18 Time: 20:15				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 9				
Total pool (balanced) observations: 45				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.658076	14.23250	-0.327285	0.7456
LOG(X1?)	1.186715	0.236805	5.011361	0.0000
LOG(X2?)	0.238096	0.810789	0.293660	0.7709
LOG(X3?)	-0.025898	0.080910	-0.320090	0.7510
LOG(X4?)	-0.534292	0.557265	-0.958776	0.3449
Fixed Effects (Cross)				
_KAB_LEBAK--C	0.377576			
_KAB_PANDEGLANG--C	0.233956			
_KAB_SERANG--C	-0.096091			
_KAB_SERANG--C	-0.096091			
_KAB_TANGERANG--C	0.374976			
_KOTA_CILEGON--C	-0.401633			
_KOTA_SERANG--C	-0.295028			
KOTA_TANGERANG--C	1.754820			
_KOTA_TANGSEL--C	-1.852485			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.958901	Mean dependent var	14.29660	
Adjusted R-squared	0.943489	S.D. dependent var	0.850418	
S.E. of regression	0.202161	Akaike info criterion	-0.122649	
Sum squared resid	1.307816	Schwarz criterion	0.399276	
Log likelihood	15.75960	Hannan-Quinn criter.	0.071919	
F-statistic	62.21768	Durbin-Watson stat	1.999575	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Olah Data *E-Views* 8

Lampiran 5 HASIL REGRESI UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests				
Pool: POOL				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	23.550206	(8,32)	0.0000	
Cross-section Chi-square	86.837204	8	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: LOG(Y?)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/14/18 Time: 21:30				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 9				
Total pool (balanced) observations: 45				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.340047	3.437140	2.135510	0.0389
LOG(X1?)	0.495745	0.230472	2.151001	0.0376
LOG(X2?)	-0.215065	0.047769	-4.502219	0.0001
LOG(X3?)	0.192400	0.099551	1.932675	0.0604
LOG(X4?)	0.433034	0.145212	2.982074	0.0049
R-squared	0.716930	Mean dependent var	14.29660	
Adjusted R-squared	0.688623	S.D. dependent var	0.850418	
S.E. of regression	0.474543	Akaike info criterion	1.451511	
Sum squared resid	9.007650	Schwarz criterion	1.652251	
Log likelihood	-27.65900	Hannan-Quinn criter.	1.526345	
F-statistic	25.32697	Durbin-Watson stat	0.362318	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Olah Data E-Views 8

Lampiran 6 HASIL REGRESI UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Pool: POOL				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	21.255990	4	0.0003	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(X1?)	1.186715	1.092970	0.038909	0.6346
LOG(X2?)	0.238096	-0.101767	0.654440	0.6744
LOG(X3?)	-0.025898	0.027228	0.001659	0.1921
LOG(X4?)	-0.534292	0.263756	0.294317	0.1413
Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: LOG(Y?) Method: Panel Least Squares Date: 02/14/18 Time: 21:31 Sample: 2011 2015 Included observations: 5 Cross-sections included: 9 Total pool (balanced) observations: 45				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.658076	14.23250	-0.327285	0.7456
LOG(X1?)	1.186715	0.236805	5.011361	0.0000
LOG(X2?)	0.238096	0.810789	0.293660	0.7709
LOG(X3?)	-0.025898	0.080910	-0.320090	0.7510
LOG(X4?)	-0.534292	0.557265	-0.958776	0.3449
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.958901	Mean dependent var	14.29660	
Adjusted R-squared	0.943489	S.D. dependent var	0.850418	
S.E. of regression	0.202161	Akaike info criterion	-0.122649	
Sum squared resid	1.307816	Schwarz criterion	0.399276	
Log likelihood	15.75960	Hannan-Quinn criter.	0.071919	
F-statistic	62.21768	Durbin-Watson stat	1.999575	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Olah Data *E-Views*